# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum Legislative 2014 adalah Pemilihan Umum dimana Partai Politik diharuskan untuk memberi kesempatan kader – kader perempuannya yakni dengan kuota 30 persen, untuk bertarung memperebutkan kursi di Dewan . Sesuai dengan Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum., seluruh partai politik wajib memenuhi kuota 30 persen perempuan dari keseluruhan calon legislative yang akan dicalonkan. Akan tetapi merujuk pada fakta lapangan Undang - Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum dengan mengamanatkan keterwakilan 30 persen calon legislative perempuan bagi setiap partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2014 . Undang – undang tersebut dibuat dengan memiliki tujuan mulia yakni untuk memperjuangkan semangat kesetaraan gender di tataran politik , dengan harapan dengan semakin ditambahnya kuota perempuan di parlemen , maka problematika – problematika terkait gender perempuan dapat terselesaikan dengan seadil – adilnya karena hanya perempuan-lah yang mengerti dan mengerti benar cara menyelesaikan berbagai persoalan – persoalan dalam hidupnya . Alasannya adalah karena dunia politik masih diyakini kalangan feminis sebagai dunia yang patriarkis. Akibatnya, komposisi perempuan di lembaga perwakilan tidak seimbang dengan jumlah penduduk perempuan. Keputusan yang dikeluarkan parlemen masih dianggap diskriminatif bagi perempuan.

Kendati undang – undang terkait dengan kuota perempuan sebenarnya sudah diberlakukan sejak Pemilihan Umum tahun 1999 dengan porsi yang berbeda – beda yakni pada tahun Pada Pemilu 1999, proporsi perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen hanya 9,2 persen dari total jumlah anggota. Tahun 2004, proporsinya meningkat jadi 11,81 persen. Peningkatan cukup besar terjadi pada Pemilu 2009, 18 persen , serta pada 2014 ini kuota perempuan-pun lebih ditingkatkan lagi , yakni sebanyak 30 persen . Namun pada kenyataanya apakah dengan adanya kuota perempuan yang semakin lama semakin diperbesar tersebut terbukti mampu menyelesaikan problematika perempuan di lapangan konkret .

Ternyata tidak , terbukti dengan hasil jajak pendapat Kompas tahun 2013 memperlihatkan, kehadiran perempuan di DPR dinilai publik belum membawa perubahan nyata di masyarakat. Secara umum, 62,5 persen responden menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja para perempuan politisi di Senayan. Di samping itu , sejumlah sektor strategis pun disorot publik. Salah satunya adalah soal pekerja migran. Enam dari sepuluh responden menyatakan tak puas atas upaya perempuan anggota parlemen dalam menghasilkan perundang-undangan yang melindungi para perempuan pekerja migran. Bahkan, kerja perempuan anggota legislatif untuk memajukan pendidikan pun dinilai masih kurang memuaskan oleh separuh bagian responden. Padahal kuota 30 persen bagi wanita, oleh wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli Diharapkan, dapat merubah kebijakan keuangan terkait

anggaran yang lebih progender. [1]Pendapat yang senada juga diungkapkan oleh Ani Sucipto pengamat politik dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI), dalam diskusi empat pilar bertema "Penguatan Peran Politik Perempuan" di Ruang Perpustakaan MPR RI, Jakarta, menilai, kinerja perempuan di Parlemen belum efektif secara substantif meski ada peningkatan jumlah pada periode 2009-2014 ini. Masih tingginya kasus yang mendera perempuan, seperti KDRT dan angka kematian ibu (AKI), menunjukkan keterwakilan perempuan di Parlemen belum optimal. Keterwakilan mereka belum mampu mengubah citra dan kinerja Parlemen serta belum mampu menyuarakan isu jender dalam proses pembuatan perundang-undangan. [2]

Di sisi lain Kendala – kendala juga menimpa seluruh Partai politik mengenai permasalahan kaderisasi perempuan itu sendiri . Mulai dari susahnya mencari kader perempuan yang bakal dijadikan calon legislatif , terbukti dengan argumen dari pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, ada dua faktor yang menyulitkan parpol memenuhi syarat kuota 30 persen caleg perempuan, yakni faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal, kaum perempuan berkualitas baik belum banyak yang ingin terjun ke politik.Lanjutnya, banyak perempuan dengan tingkat pendidikan baik masih mempersepsikan politik sebagai arena pertarungan yang tidak sehat dan keras. Mereka khawatir, jika terjun ke politik terjebak konflik dan tipu muslihat. Perempuan tidak suka bersaing kotor apalagi saling menjatuhkan. Mereka

---

[1] Situs Resmi *Woman Communication's and Information Centre* ,www.kaylanamitra.com , diakses pada tanggal 10 December 2014.

[2] Kuota 30 Persen Perempuan di Demokrasi Parlemen? Solusikah?," *Era MuslimMedia Islam Rujukan* , Kamis, 18 Juni 2015 , diakses pada 18 Juni 2015 .

cenderung menolak praktik money politics yang kerap terjadi di pemilu. Faktor ini membuat perempuan berpikir dua kali untuk mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Sedangkan faktor internal, lanjut dia, dipicu ketidakseriusan parpol untuk merekrut kader perempuan. Parpol sedari awal tidak agresif mempersiapkan perempuan untuk menjadi kader berkualitas dan bisa dibanggakan. Lanjutnya Parpol harusnya bertanggung jawab mengembangkan potensi kaum perempuan, tidak hanya mencari caleg jadi. Partai politik seharusnya punya inisiatif dan agresif menciptakan kader perempuan berkualitas.[3] Dalam hal ini terdapat fakta – fakta lapangan yang merujuk pada kesulitan – kesulitan mencari kader perempuan di Lapangan Riel , diantaranya Menururt hasil penelitian dari Hendri Koeswara pada tahun 2005 terkait dengan Studi Tentang Kendala Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Kegiatan Pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi menghasilkan beberapa temuan – temuan dimana Partai Politik mengalami kesulitan – kesulitan dalam proses kaderisasi perempuan , karena adanya kendala – kendala yang ada pada partisipasi politik yakni kondisi sosial budaya dan kondisi psikologis yang masih sangat kuat dimana menganggap perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga dengan pembagian ideologi publik dan domestik . Kedua, adanya tafsir agama yang melarang perempuan berkecimpung di ruang publik . Serta ketiga , kualitas SDM perempuan itu sendiri dimana pengetahuan , kecakapan berorganisasi , pendidikan , sikap mental dan pemahaman politik yang masih rendah . [4]

---

[3] Kedodoran Nyari Caleg Perempuan ," *Kantor Berita Politik RMOL.co ,"* Kamis 4 April 2013, diakses pada 11 Desember 2014.

[4] Hendri Koeswara ,"*Studi Tentang Kendala Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Kegiatan Pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi* ,2005 halaman 6.

Dengan adanya fakta – fakta diatas , maka tidak mengherankan bahwasanya hingga tataran politisi perempuan-pun mengungkapkan keluh kesah dan kekhawatirannya mengenai kuota 30 persen perempuan , alasannya mulai dari sulitnya mencari kader perempuan yang akan dijadikan calon legislatif yang pada akhirnya berujung pada kekhawatiran – kekhawatiran terhadap adanya praktek – praktek politik yang sifatnya transaksional , seperti yang dikatakan oleh Khofifah Indar Parawansa , yakni politisi perempuan Nadhatul Ulamah . Menurut khofifah secara umum, peran politik perempuan di Indonesia masih kurang signifikan. Bahkan kuota 30 persen bagi caleg perempuan, selain cukup positif, namun juga menyisakan sejumlah masalah. Dengan sistem kuota seperti ini, yang terjadi adalah mencari caleg perempuan untuk memenuhi kuota saja, dan itu dilakukan menjelang pemilihan. Sementara beberapa tahun sebelumnya, tidak ada proses pendidikan dan pengkaderan politik yang dilakukan partai. Fakta di lapangan, lanjut Khofifah, kehadiran perempuan menjadi sekedar saja. Bahkan, ada banyak terjadi, partai akhirnya mengusung caleg perempuan yang merupakan istri atau anak dari pengurus partai tersebut. Jikalau mereka dengan kualitas yang tidak mumpuni lantas bisa terpilih menjadi anggota legislatif yang sesungguhnya , niscaya representatsi subtantif tidak akan pernah terlanksana.[5] Berdasarkan dengan permasalahan – permasalahan diatas, penulis hendak meneliti tantangan – tantangan apa saja yang di hadapi oleh Partai Hanura di Kabupaten Sampang dalam proses kaderisasi perempuan serta bagaimana sistem kaderisasi yang dijalankan DPC Hanura Kabupaten Sampang untuk mendapatkan calon –

[5] Kantor Berita Politik www.Rmol.com ," *Khofifah Ungkap Masalah di Balik Kuota 30 Persen Caleg perempuan* , Kamis 24 April 2014 , diakses pada 20 Desember 2014 .

calon legislatif perempuan dalam upaya memenuhi kuota 30 persen perempuan pada pemilihan umum 2014 .

Dipilihnya daerah Sampang sebagai lokasi penelitian disebabkan oleh religiusitas masyarakat Sampang telah dikenal luas sebagai bagian dari keberagamaan kaum muslimin di Indonesia yang sangat berpegang teguh pada tradisi ajaran Islam dalam realitas kehidupan sosial budayanya . Dengan adanya hal itu akan memberikan kesepakatan pembenaran atas penempatan perempuan dalam ranah domestik dan laki – laki pada ranah publik serta didukung dengan mengabadikan budaya patriarki dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah tersebut . Kemudian Partai Hanura dipilih karena Partai ini tergolong partai baru dengan mesin politik yang masih relative kecil , yakni Pemilu 2014 adalah menjadi pemilu kedua bagi partai tersebut. Partai Hanura juga memiliki jaringan elektoral , secara organisasi yang terlebih dulu ada di Kabupaten Sampang yakni sudah dimulai dari tahun 2006 , dibandingkan dengan partai – partai baru yang lain seperti Partai Gerindra , maupun Nasdem. Selain itu Partai Hati Nurani Rakyat adalah Partai Nasionalis yang justru bertolak belakang dengan karakteristik masyarakat Sampang .

## 1.2 Rumusan Masalah

a). Apa saja tantangan - tantangan yang dihadapi Partai Hati Nurani Rakyat dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan**?**

b). Bagaimana sistem kaderisasi perempuan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat di Madura . untuk memenuhi kuota 30% perempuan di parlemen?

## 1.3 Tujuan Penelitian

a) Mendeskribsikan tantangan - tantangan yang dihadapi oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Hati Nurani Rakyat dalam memenuhi kuota 30% perempuan pada Pemilihan Umum 2014.

b) Mendeskribsikan strategi - strategi kaderisasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Hati Nurani Rakyat di kabupaten Sampang untuk mendapatkan kader-kader perempuan yang akan bertarung pada Pemilihan Umum 2014.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Praktis

a) Sebagai sarana transparansi partai politik terhadap publik mengingat selama ini partai politik sangat tertutup dengan urusan internalnya.

1.4.2 Aspek Akademik

b) Menambah kajian pada ranah ilmu Politik terutama, khususnya pada bidang kaderisasi partai politik .

c) Menyediakan data mengenai strategi kaderisasi yang dilakukan oleh Partai politik sebagai referensi organisasi - organisasi sosial lainnya yang ada di masyarakat.

## 1.5 Konseptualisasi

### 1.5.1 Partai Politik

Partai politik merupakan sebuah wadah yang sangat memegang peranan strategis dalam proses demokrasi, partai politik berperan sebagai sarana penghubung atau jembatan antara warga negara dengan pemerintah yang berkuasa. Partai politik dapat menempatkan kader-kadernya dalam posisi lingkaran kekuasaan yang strategis di ranah pemerintahan , yang berarti dapat menghasilkan kebijakan publik yang berdampak luas. Karena itu kehadiran partai politik harus tidak terlepas dari fungsi dan tanggung jawabnya, tidak hanya kepada konstituennya tetapi juga kepada bangsa dan negara.

Definisi partai politik secara garis besar dapat kita artikan adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional**,** untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.[6]

Definisi lain dikemukakan oleh Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi para aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau

[6] Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: Gramedia, 1986.) hal 160

golongan-golongan lain yang memiliki pandangan berbeda.[7]

Sementara itu , Leon D. Epstein mendefinisikan partai politik adalah sekelompok orang yang secara penuh terlibat dalam politik, dan mempunyai tujuan utama terwakilinya secara formal di dalam institusi-institusi pembuat kebijakan pemerintah.[8]

Lapalombara dan Weiner mendefinisikan partai politik berdasarkan ciri-ciri yang mereka buat yaitu, berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara terus-menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, dan ikut serta dalam pemilihan umum.[9]

Ada tiga teori yang membahas asal usul partai politik.[10] Yang *pertama* adalah teori kelembagaan. Teori ini melihat Partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang sudah ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat pula. Yang *kedua* adalah teori situasi historik. Teori ini melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern ya berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti pertambahan penduduk karena

---

[7] Sigmund Neumann dalam Cheppy Hericahyono, *Ilmu Politik dan Prespektifnya,* (Yogyakarta:1991), hal 195.
[8] http://kushandayani.blog.undip.ac.id/2009/12/28/partai-politik/ diakses tanggal 20 Desember 2014.
[9] Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 1992.) hal 114-115
[10] Ibid, hal 113.

perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan barn, dan munculnya gerakan-gerakan populis. Yang *ketiga* adalah teori pembangunan. Teori ini melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut.

### 1.5.2 Kaderisasi dalam Partai Politik

Partai politik sebagai salah satu instrumen penting demokrasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas, baik untuk kepemimpinan kedepan partai politik itu sendiri maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai memerlukan kaderisasi untuk dapat mencetak kader-kader yang berkualitas sehingga partai politik tersebut dapat berkembang. Perlu suatu proses pendidikan baik yang bersifat formal maupun non-formal yang membentuk jiwa dan karakter pemimpin tersebut.

Pengertian kader adalah : orang yang diharapkan atau dipersiapkan untuk dapat memegang jabatan atau pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai atau

sebagainya.[11] Pengertian kader yang lain menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah :[12]

1. Kader adalah orang yang dicalonkan untuk memegang pekerjaan penting dalam pemerintahan, partai, perusahaan dan sebagainya.
2. Kader adalah orang yang diharapkan bakal mampu memngaku jabatan penting di kemudian hari.

### 1.5.3 Kaderisasi Perempuan

Kaderisasi adalah proses pengaderan seorang calon anggota organisasi agar dapat diterima menjadi anggota organisasi dengan cara yang sistematis dan terencana. Tujuan utama dari pengaderan ini adalah agar organisasi mempunyai anggota yang memahami visi, misi, mampu menjalankan program organisasi. Kaderisasi dalam hal ini adalah proses untuk menjaring perempuan – perempuan Sampang untuk menjadi anggota Partai Politik Hati Nurani Rakyat , yang kemudian diorientasikan untuk menjadi calon legislativ perempuan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat , Kabupaten Sampang yang akan maju dalam Pemilihan Umum Legislativ 2014, yang kemudian diharapkan untuk dapat merepresentasikan kepentingan– kepentingan dan aspirasi wanita Sampang kelak calon – calon legislativ perempuan tersebut menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sampang .

Terkait dengan kader perempuan dengan segala tujuan dan orientasi –

[11] http://www.artikata.com/arti-332376-kader.html , diakses pada tanggal 9 Juni 2014
[12] Peter Salim, *kamus Bahasa Idonesia Kontemporer*,Jakarta:ModernEnglish2002

orientasinya yang telah dijelaskan diatas , maka dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat , kabupaten Sampang dituntut untuk mempersiapkan politisi – politisi perempuan yang handal agar benar – benar dapat mewakili aspirasi dan kepentingan dan segala kebutuhan perempuan Sampang di lapangan konkret . Kedua , karena pada dasarnya untuk menjadi seorang kader pada proses kaderisasi ini juga harus sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dan peraturan – peraturan yang ada di internal Partai Hati Nurani Rakyat itu sendiri mulai dari standard umurnya , nilai ideology yang sama , tingkat pendidikan , kualitas dalam bidang perpolitikan dan lain sebagaianya. Untuk mendapatkan kader – kader perempuan di Sampang handal, yang akan dijadikan sebagai calon legislativ perempuan sebagai perwakilan dari perempuan – perempuan Partai Hati Nurani Rakyat , khususnya daerah Sampang , maka dalam hal ini DPC Hanura memiliki sistem kaderisasi perempuan yang didalamnya terdapat strategi – strategi maupun program – program untuk menjaring perempuan – perempuan Sampang dan selama proses pelaksanaan program – program internal , partai pasti menemui berbagai kendala – kendala di lapangan riel .

3. Kader adalah orang yang diharapkan bakal mampu memangku jabatan penting di kemudian hari.

Kaderisasi adalah pendidikan politik _yang dilakukan oleh parpol untuk menanamkan rasa cinta-dan setia pada partai dan pada negara bangsa. Dalam kaderisasi itu jugs diajarkan kepada para kader partai cara-cara beraktivitas politik yang benar dan menjadi pemimpin yang baik.

Sistem kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan itu. Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas tinggi.

## 1.6 Kerangka Teoritik

### 1.6.1 Partai Politik

Lapalombara dan Weiner mendefinisikan partai politik berdasarkan ciri-ciri yang mereka buat yaitu, berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara terus-menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, dan ikut serta dalam pemilihan umum.[13]

Terdapat tiga teori yang membahas asal usul partai politik.[14] Yang *pertama* adalah teori kelembagaan. Teori ini melihat Partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang sudah ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat pula. Yang *kedua* adalah teori situasi historik. Teori ini melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Krisis situasi historis terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern ya berstruktur kompleks. Pada situasi ini terjadi berbagai perubahan, seperti pertambahan penduduk karena perbaikan fasilitas kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan barn, dan munculnya gerakan-gerakan populis. Yang *ketiga* adalah teori pembangunan. Teori ini melihat partai

[13] Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik (Jakarta: Grasindo, 1992.) hal 114-115
[14] Ibid, hal 113.

politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut.

### 1.6.2 Fungsi Partai Politik

Secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua.[15] Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi. Di sini peran dan fungsi organisasi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Secara detail fungsi partai politik antara lain[16]:

15 Ibid , hal 69

16 Ibid ,hal 116-121.

1. Sosialisasi Politik

   Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisai politik adalah membentuk sikap dan orientasi politik masyarakat. Melalui proses sosialisasi inilah masyarakat diharapkan memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat bangsa dan negara.

2. Rekrutmen Politik

   Yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

3. Partisipasi politik

   Fungsi partisipasi politik adalah mengajak warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksana kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Tidak ada pembedaan khusus di dalamnya karena hal ini parpol dapat bekerja atas nama konstituen ataupun masyarakat pemilihnya.

4. Pemadu Kepentingan

   Pemadu kepentingan adalah kegiatan menampung, menganalisis, dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5. Komunikasi Politik

   Partai politik dalam fungsi ini berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak

hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

6. Pengendalian Konflik

   Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

7. Kontrol Politik

   Kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

### 1.6.3. Klasifikasi Partai Politik

Dalam literatur ilmu politik, secara umum sifat partai politik dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu, partai leader dan partai massa. Namun dalam praktik, antara kedua kategori ini sering tidak terbagi ekstrim, akan tetapi merupakan perpaduan ciri-ciri dari keduanya, atau disebut partai berstandar ganda (campuran).[17]

---

17 Ir.H.Suroto,MM dan Drs. Doddy Rudianto,MM, *Partai-Partai Politik di Indonesia* (,Jakarta:PT Citra Mandala Pratama, 2003), hal 33-35

1. Partai Kader

   Partai kader lazimnya lebih mengutamakan tampilan kualitas anggota dan pengurusnya. Dalam proses rekruting anggota, apalagi dalam pengangkatan pengurus sangat memperhatikan kualitas penokohan masing-masing individual. Disiplin partai lebih ditegakkan, lebih mengacu kepada aturan-aturan baku yang berlaku spesifik partai

2. Partai Massa

   Partai massa lebih berorientasi kepada dukungan massa dalam jumlah besar. Umumnya amat mengabaikan mengenai kualitas anggotanya, siapa saja boleh masuk tidak pandang bulu, apakah termasuk orang bermutu atau dari lapisan mana saja yang penting dapat menarik dukungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, lebih menekankan pada perhitungan kuantitatif. Partai massa lebih tertuju pada upaya perolehan suara yang besar dan pemenangan pemilihan umum.

3. Partai Berstandar Ganda

   Sifat partai berstandar ganda adalah memadukan kedua ciri-ciri antara partai kader dan partai massa. Di satu pihak, kebijakan partai memprogram lainnya kader-kader partai yang berkualitas, artinya pendekatan yang selektif, bahkan sering mengincar tokoh-tokoh berbobot yang masih netral di luar partai yang dipandang cukup bermutu. Di pihak lain, kebijakan partai juga longgar untuk merekrut orang-orang yang kurang berkualitas dalam arti pendidikan rendah akan tetapi menguntungkan dari segi dukungan

penghimpun suara.

### 1.6.4 Representasi Politik

Bidang politik merupakan salah satu bidang yang vital dalam kehidupan bernegara , yakni bidang politik mempunyai peranan sangat penting untuk menghasilkan produk hukum maupun kebijakan publik di kabinet . Bidang politik juga mempunyai peranan dalam pembanguan masyarakat mulai dari yang kecil sampai yang besar. Sedangkan, keseluruhan total jumlah penduduk di Indonesia setengahnya adalah perempuan. Akan tetapi, kualitas hidup yang dimiliki perempuan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak sekali perempuan yang tidak mendapatkan akses dan peluang untuk berpartisipasi optimal dalam proses pembangunan. Dengan begitu, tidak mengherankan bila jumlah perempuan yang menikmati hasil pembangunan juga lebih terbatas dibandingkan laki-laki.

Hanna Fenichel Pitkin mengemukakan bahwa "*the representative system is the modern form of democracy*" yang berarti bahwa representasi adalah layak dalam politik modern. *Pada kenyataanya ,* di kebanyakan sistem politik, perempuan menempati proporsi kecil dalam jabatan-jabatan politik dan secara umum perempuan relatif sedikit memiliki posisi kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan publik dan privat. Perempuan sebagai anggota kelompok sosial struktural kurang ter-representasi dan ketidaksamaan struktural sosial tersebut

sering menghasilkan ketidaksamaan keputusan politik dan eksklusi relatif bagi perempuan dari diskusi politik yang berpengaruh.[18]

Dengan alasan – alasan tersebut, maka secara langsung efeknya akan mengundang inklusi politik yang lebih besar dengan mendorong lebih banyak representasi kelompok-kelompok yang tak terepresentasi, khususnya ketika kelompok ini minoritas atau menjadi subyek ketidaksamaan struktural. Aktivis gerakan perempuan di banyak bagian negara menuntut bahwa legilatif yang kebanyakan adalah laki-laki tidak dapat dikatakan layak untuk merepresentasikan perempuan. Respon atas tuntutan tersebut, beberapa pemerintah membuat peraturan yang dirancang untuk mendorong lebih banyak legislator perempuan.

Selanjutnya (Budiarjo, 2003:175) menyatakan bahwa perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (political representation).

Representasi merupakan suatu bentuk partisipasi perempuan untuk ikut turut andil dalam sektor publik. Perempuan mempunyai kepentingan yang berbeda dari laki-laki. Oleh karenanya perlu adanya perwakilan dari kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam bidang politik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk emansipasi berupa gerakan yang mencita-citakan kehidupan setara antara

[18] Dwi Windyastuti., Dra., MA , Representasi Perempuan *:* Persilangan antara Representasi Deskriptif Dengan Subtantif , http://dr-d-w-fisip.web.unair.ac.id/, diakses pada tanggal pada tanggal 10 Juni 2015 .

perempuan dengan laki-laki, yakni gerakan yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan.

Selanjutnya , mengenai skema representasi kelompok sosial tertentu, baik dalam bentuk *reservation seat* (kursi pesanan), aturan daftar partai, *affirmative action* melalui teknik kuota dalam daftar pemilu, representasi proporsional, yang kesemuanya untuk mempromosikan representasi kelompok yang termarginalkan. *Pertama*, bahwa semakin banyak jumlah wakil perempuan maka akan lebih banyak kepentingan perempuan yang akan teragregasikan dan terakomodasikan. Lebih banyak wakil perempuan biasanya akan menghasilkan lebih banyak informasi dan pandangan yang terkait dengan preferensi perempuan, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih *legitimate*. *Ke dua,* kelompok yang tidak diuntungkan perlu lebih banyak wakil untuk menghasilkan *critical mass.* Ada kebutuhan untuk menghasilkan kemauan di antara wakil untuk menyatakan posisinya yang berbeda dari posisi kelompok mayoritas di lembaga perwakilan. Artinya bahwa semakin banyak jumlah wakil perempuan maka perempuan sebagai "kelompok minoritas" bisa mengafirmasikan diri kepada kelompok dominan bahwa perspektif atau *insight* mereka sangat dirasakan di dalam kelompok minoritas. *Ke tiga*, karena isi dan jangkauan perwakilan sering tidak dapat diprediksikan, maka proporsionalitas wakil diperlukan untuk merepresentasi jangkauan pandangan yang diwakili. [19]

[19] Dwi Windyastuti., Dra., MA , Representasi Perempuan *:* Persilangan antara Representasi Deskriptif Dengan Subtantif , http://dr-d-w-fisip.web.unair.ac.id/, diakses pada tanggal pada tanggal 10 Juni 2015 .

Ada perbedaan pengalaman dan komitmen di antara jenis kelamin sehingga ketika preferensi kepentingan perempuan direpresentasi oleh jenis kelamin lain, maka wakil tersebut selalu dibayang-bayangi oleh komitmen dan pengalamannya yang berbeda dengan komitmen dan pandangan perempuan. Adanya perbedaan pengalaman, komitmen dan pandangan mengakibatkan yang diwakili akan dibawa kepada kepentingan wakil .

Dengan adanya keterkaitan dengan representasi perempuan terdapat upaya Affirmative Action melalui mekanisme kuota 30% untuk meningkatkan partisipasi perempuan. berikut ini beberapa alasan diperlukannya kuota bagi perempuan[20]:

1. Angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang sangat rendah, dan terjadi di berbagai tingkatan.
2. Berkaitan dengan reran transisi rasi di Indonesia. Perempuan sebagai mayoritas dari populasi dan pemilihan, seharusnya kepentingannya dapat terwakili dalam kebijakan yang dihasilkan.
3. Peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik diperlukan, karena memiliki nilai dan pandangan khas yang secara umum hanya bisa dimiliki dan bisa dirasakan oleh perempuan.

Sedangkan menurut Susan D Clyaton dan Faye J Crosby (Soetjipto, 2005:99-100), definisi dari Affirmative action adalah sebagai berikut:

*... an attempt to make progress toward substantive, rather than merely formal,*

---

20 Soetjipto, Ani Widyani, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005

*equality of opportunity for those groups, such as women or racial minorities, which are currently underpresented in significant positions in society, by explicitly taking into account the defining characteristic-sex or race which has been the basis for disrimination.*

(sebuah usaha untuk membuat kemajuan sesungguhnya, pada lembaga formal kesetaraan dalam memperoleh kesempatan pada masing-masing kelompok yang meliputi perempuan atau ras minoritas, yang secara tegas mengambil jumlah ketetapan pada karakteristik jenis kelamin atau ras yang menjadi basis dari diskriminasi). Dari penjelasan di atas mengenai Affirmation action, yang mana tuntutan-tuntutan akan jumlah tertentu bagi perempuan yakni minimal 30 persen dalam lembaga-lembaga politik merupakan suatu bentuk pencapaian hak asasi manusia, porsi keterwakilan politik perempuan juga merupakan tindakan strategis yang mana sifatnya sementara untuk mengurangi hambatan individu dalam rekrutmen yang biasanya disebabkan kontrol orang-orang atau sistem tertentu.

Namun, kondisi perempuan Indonesia masih jauh dari harapan termasuk dalam bidang politik, suatu bidang yang sesungguhnya sangat strategis bagi kepentingan perempuan, tetapi sering dianggap tabu untuk dimasuki. Hak demokratik yang bersifat proposional bagi kaum perempuan, baik hak untuk memilih dan hak untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum, dalam bentuk terjaminnya serta terpenuhinya keterlibatan perempuan dalam wilayah partisipasi politik dinilai belum cukup signifikan. Partisipasi perempuan dalam kegiatan politik serta kesempatan dan kemampuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan menunjukkan peningkatan yang sangat lambat. Hal ini terlihat dalam

jumlah perempuan yang duduk atau menjabat di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Dengan demikian, dua bentuk partisipasi politik diatas, politisi perempuan merupakan partisipasi dalam bentuk konvensional yang merupakan bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern, sedangkan non-konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal seperti petisi, maupun yang ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Kehadiran politisi perempuan dalam parlemen diharapkan bisa menjadi dan dapat pula meningkatkan kesadaran tentang perlunya menyusun sebuah agenda politik yang lebih peka gender (gender sensitive). Artinya, bahwa kehadiran perempuan dalam ranah politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan dan keadilan gender.

Selanjutnya , menurut Dwi Windyastuti dan Kris Nugroho terdapat argumentasi – argumentasi pentingnya sistem kuota untuk representasi perempuan [21]:

1. Argumen keadilan yang bahwa perempuan mewakili separuh penduduk dan tentunya punya hak setengah kursi.
2. Argumentasi pengalaman, dimana perempuan memiliki pengalaman yang berbeda (kontruksi secara biologis dan sosial) sehingga mestinya perempuan terwakili.
3. Argumen kelompok kepentingan yaitu bahwa perempuan dan laki-laki

[21] Dwi Windyastuti & Kris Nugroho . 2006. *Akomodasi Partai Politik Terhadap Kuota Perempuan Dalam Pemilu 2004*. Women Study Center. UNAIR

mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga laki-laki tidak dapat mewakili kepentingan yang berbeda. Laki-laki tidak dapat mewakili kepentingan perempuan secara menyeluruh .

Oleh karena itu, perempuan sejatinya berkewajiban untuk selalu membuktikan bahwa perempuan pantas dan bisa di andalkan, termasuk di dunia perpolitikan .Kunci keberhasilan perempuan dalam jabatan pemerintahan adalah menjadi orang yang bisa diandalkan diantaranya adalah memberi perintah yang jelas dan mau menindaklanjuti, memeriksa kembali setiap pertanyaan dan kasus demi keakuratan, menjaga integritas pribadi dan benar-benar menjaga kepercayaan masyarakat**.** Yang paling penting, is harus bisa bekerja sama dan menghasilkan solusi bersama atas problematika masyarakat dengan seadil – adilnya .

### 1.6.5 Rekrutmen Partai Politik

Mengingat salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana rekrutment politik , sebagaimana menurut Rambal surbakti adalah Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseoang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pada pemerintahan pada khususnya , dengan mengkhususkan kepada orang – orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol ,partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin . [22]

Dari penjelasan – penjelasan diatas , maka bisa dikatakan bahwasanya rekrutment

[22] Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1992.) hal 118

pada partai politik adalah ajang untuk memilih orang – orang yang pantas untuk menduduki jabatan – jabatan politik di kemudian hari , baik dalam internal partai tersebut maupun di luar partai di kemudian hari .

Setiap partai politik tentu saja memiliki mekanisme atau prosedur rekrutmen yang berbeda – beda . Tentu saja , Anggota anggota yang akan direkrut adalah yang orang – orang yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. . Pada referensi yang lain, kita bisa menemukan definisi atau pengertia rekrutmen politik yang lebih memperhatikan sudut pandang fungsionalnya, yaitu "The process by which citizens are selected for involvement in politics". maksudnya , rekrutmen politik adalah proses yang melibatkan warga negara dalam politik.[23]

Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administrative, penelitian khusus yanitu menyangkut kesetiaaan pada ideology Negara.

### 1.6.6 Pola Rekrutment Partai Politik

Pola pada dasarnya adalah sebuah struktur yang tetap dan terencana . Pola rekrutment adalah konstansi berbagai berbagai praktek perekrutan oleh partai politik . Pada dasarnya setiap partai politik seharusnya memiliki prinsip untuk

[23] Gaffar,Afan.2005.*Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

terbuka bagi kelompok sosial manapun , namun pada level praktis , acapkali praktek – praktek tersebut sulit ditemukan di lapangan riel karena setiap partai politik memiliki kondisi struktural yang berbeda- beda . Rekrutmen politik memiliki dua aspek dasar yakni subjek politik yakni dalam artian manusia sebagai subjek – subjek pelaku sistem politik , yang kedua adalah objek politik dalam artian partai politik . [24]

Rush dan Althoff berpendapat bahwasanya mekanisme rekrutmen politik memiliki dua sifat. Pertama , sifat tertutup dimana suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas patronase. Yang kedua adalah sifat terbuka dimana dalam sistem ini partai – partai politik harus menyelenggarakan ujian – ujian terbuka kepada calon kadernya . Proses perekrutan juga memiliki sifat khusus dalam tafsirannya , misalnya untuk perekrutan administratif dipelukan faktor – faktor lindungan (patronase) dalam prosesnya , dalam artian proses kedekatan dengan seseorang akan sangat berpengaruh dalam proses pemilihan kader partai maupun pemimpin partai .[25]

Selanjutnya , menurut Rush dan Althoff mengemukakan , terdapat dua jenis sistem rekrutment politik . Pertama sistem rekrutment terbuka dimana dalam hal ini seluruh warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses penyeleksian menjadi calon kader partai politik yang nantinya akan menduduki jabatan – jabatan tertentu baik di internal maupun eksternal . Kedua , rekrutment tertutup , diamana dalam hal ini tidak semua warga negara berkesempatan untuk

[24] I ketut Putra Erawan , Riswanda Imawan dkk . 2010. *Draft Modul Organisasi dan Manajemen Kepartaian : Bab 1 Manajemen Sumber Daya Manusia Politik* . Hal : 17-18 .
[25] Michael Rush and Philip Althoff , 2007 , Pengantar Sosiologi Politik , Alih Bahasa oleh Kartini Kartono , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , Hal : 247 .

mengikuti seleksi yang diadakan suatu partai politik , dalam artian hanya orang – orang tertentu saja yang boleh bersaing untuk mendapatkan kedudukan – kedudukan tertentu dari suatu partai politik . [26]

**1.6.7 Kriteria Calon Legislatif .**

Calon legislatif adalah orang orang (wakil – wakil partai ) yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif (calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ), yang akan dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum Legislatif [27]. Dalam hal ini , tentu saja calon – calon legislatif harus memiliki kemampuan atau skill yang baik mengenai dunia kepemimpinan , politik sehingga orang – orang tersebut dapat menjalan tugasnya dengan baik kelak terpilih menjadi anggota legislatif dan menjadi wakil rakyat . Oleh karena itu , Richard . S. Katz dan William Crotty merumuskan kriteria – kriteria apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi Calon Legislatif yang ideal :[28]

1. Usia , dimana seorang calon haruslah berusia , minimal 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi calon legislatif. Dalam hal ini Faktor usia berperan sangat penting karena usia dapat mengukur tingkat kematangan seseorang dalam berfikir , menganalisis masalah , maupun berinteraksi langsung kepada persoalan – persoalan masyarakat .

[26] Hesel Nogi Tangkisilan ,2003 , *Kebijakan Publik yang Membumi ,* Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia . Hal : 118 .
[27] http://www.pemilu.com/caleg/ , diakses pada 19 juli 2015 .
[28] Richard S. Katz . and William Crotty , *Handbook of Party Politics* , London : Sage Publications . Page 89 – 91

2. Popularitas , dimana seorang calon legislative harus dikenal oleh khalayak masyarakat yang akan diwakilinya serta memiliki reputasi yang baik pula .
3. Pendidikan , seseorang calon legislatif harus memiliki latar pendidikan dan level pendidikan yang baik , dalam hal ini setidaknya calon tersebut adalah lulusan sarjana , dengan harapan calon tersebut memiliki wawasan yang luas , dapat menganalisis permasalahan – permasalahan masyarakat , kemudian dapat memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut .
4. Keuangan dan Finansial , seorang calon legislatif harus memiliki kondisi finansial yang kuat agar dapat membiayai segala kebutuhan kampanye untuk mempromosikan pribadinya dan partai politik yang diwakilinya .
5. Akseptabilitas , maksudnya adalah penerimaan masyarakat atas kehadiran calon legislatif tersebut . Penerimaan – penerimaan masyarakat akan terlihat ketika masyarakat menyadari bahwa calon legislatif yang diusungkan benar – benar sosok yang dibutuhkan untuk menyalurkan aspirasi – aspirasi masyarakat.
6. Kapabilitas , dalam hal ini seorang calon legislatif harus memiliki kemampuan untuk menyerap segala keluhan dan aspirasi masyarakat , kemudian merumuskan aspirasi – aspirasi tersebut dalam bentuk pernyataan – pernyataan , dilanjutkan dengan menyampaikan kembali rumusan tersebut kepada masyarakat .

## 1.7 Metode/Prosedur Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan gambaran secermat mungkin mengenai suatu keadaan gejala tertentu tetapi tidak berusaha melakukan pengujian hipotesis. Tipe penelitian juga ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta fakta dan sifat populasi atau objek tertentu (Kriyantono 2006).

Sementara itu , menurut Lexy Moleong , penelitian dekriptif bertujuan memberi gambaran mengenai suatu individu, keadaan , gejala atau kelompok tertentu. Adakalanya penelitian ini bertolak dari hipotesa dan adakalanya tanpa hipotesa . Dalam penelitian ini masalah sudah jelas akan tetapi langkah yang terpenting adalah penegasan dari konsep – konsep yang relevan. Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran dari suatu gejala social tertentu . Dalam penelitian ini , gejala yang akan dideskribsikan adalah mengenai bagaimana system kaderisasi. Dari data-data yang ada kemudian akan dianalisis dan diinterpretasi sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan penelitian.[29]

### 1.7.2 Pendekatan Fokus Penelitian

Metode pada penelitian kali ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kulaitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya dimana peneliti tidak berusaha memanipulasi

[29] Moleong .Lexy ,J,*Metodology Penelitian Kualitatif ,Bandung* :Remaja Rosdakarya,1998.

fenomena yang diamati .[30] Fokus penelitian ini adalah membedah secara dalam tentang mekanisme kaderisasi perempuan Partai Hati nurani Rakyat di wilayah tapal kuda , yakni Madura . Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan subjek – subjek terkait mengenai sistem kaderisasi itu sendiri beserta permasalahan – permasalahan yang terjadi di lapangan konkret saat proses kaderisasi berlangsung . Di samping itu , penulis juga akan melakukan proses pengamatan di lapangan konkret. Kemudian, penulis berusaha mengumpulkan data , kemudian menginterpretasikan data – data yang telah digali di lapangan.

### 1.7.3 Jenis Data

Data merupakan kumpulan dari fakta , dan menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua , yaitu :

1. Data primer , merupakan hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya dan hasil data yang diperoleh langsung oleh peneliti langsung dari obyekpenelitian. Wawancara tersebut dapat berlangsung antara informan kunci para anggota yang duduk di Kepengurusan DPC Hanura , Madura.
2. Data Sekunder , merupakan data yang bersifat sebagai pendukung atau penunjang keberadaan dan kebenaran data primer. Data dapat diperoleh melalui lembaga maupun instansi terkait, misalnya dokumen pendirian partai, AD/ART Partai , Susunan Pengurus ,dan lain-lain.

[30] Khubert, A .Michael&Miles ,Matthew B,*Analisis data Kualitatif* ,Jakarta :UIP,2007.

### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah berbagai literature, seperti buku-buku , artikel , majalah, dukumen – dokumen dan sebagainya yang dipandang dapat menunjang dan menjelaskan data – data lain yang dikumpulkan dilapangan. Guna melengkapi data yang diperoleh , peneliti juga melakukan wawancara dengan sejumlah informan. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan pada penelitian kulitatif yaitu dengan cara mengambil sample untuk menentukan informan atau situasi social tertentu yang diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap dan terpercaya mengenai suatu hal.

Informan yang dipilih dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara purposive , dimana para informan telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan dan informan disini telah diketahui ciri-cirinya. Informan yang telah dipilih disini adalah orang yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian , maka ia haruslah orang yang mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian.

Adapun yang berhasil diwawancarai adalah :

- H.Kuswanto, SH,MH ,MBA. (Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura , Jawa Timur )
- Drs. H. Moh. Marsuki, MSi (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura, Kabupaten Sampang )

- Abdul Maali ( Ketua Bagian Kaderisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura , Kabupaten Sampang).
- Heny Widiastuty , ST (Calon Legislative Perempuan Daerah Pemilihan Sampang 1).
- Aisyatur Rodiyah (Calon Legislative Perempuan Daerah Pemilihan Sampang 2).
- Siti Mutammamah (Calon Legislative Perempuan Daerah Pemilihan Sampang 3) .
- Hj.Siti Rofiah (Calon Legislative Perempuan Daerah Pemilihan Sampang 4).
- Musrifah (Calon Legislativ Perempuan Daerah Pemilihan Sampang 5)

**1.7.5 Teknik Analisis Data**

Informasi – informasi maupun data- data yang didapatkan dari lapangan, dalam penelitian ini selanjutnya di seleksi, diolah, dianalisa secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti. Pengolahan yang dilakukan dengan pengkatagorian data data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang diperoleh yang berusaha untuk dijawab, sehingga data – data yang diperoleh akan melalui proses pengaturan , pengurutan , pengelompokkan , dan pengkatagorian yang akan menjadi suatu uraian yang mudah dibaca dan dimengerti , dalam bentuk kata , kalimat dan paragraph.

Lexy Moleong menyatakan bahwa analisis data kualitatif digunakan untuk memperoleh kedalaman penghayatan terhadapa interaksi antar konsep yang sedang dikaji. Tujuan dari analisis dataadalah untuk mencari kebenaran data

tersebut dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. [31]

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah. Pertama, semua data yang diperoleh , baik primer maupun sekunder dipilihlah sesuai dengan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya dicari hubungan yang logis antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Data kemudian diinterpretasikan melalui teori yang relevan , sehingga permasalahan penelitian dapat dianalisis dan dapat memberi gambaran yang cermat mengenai individu , keadaan , gejala , atau komunitas tertentu . Dengan demikian proses analisa terhadap suatu data diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan – kesimpulan yang tepat.

### 1.7.6 Lokasi Penelitian

Penelitian kali ini dilakukan di sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat wilayah Madura, Kabupaten Sampang .

Adapun yang menjadi pertimbangan peniliti , antara lain :

1. Alasan Akademis

Berdasarkan tujuan penelitian diatas yakni untuk mendeskribsikan tantangan – tantangan yang dihadapi Partai Politik Hati Nurani Rakyat dalam proses kaderisasi perempuan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan , serta yang kedua adalah bagaimana system kaderisasi perempuan yang dijalankan itu sendiri sebagai tindak lanjutnya , sehingga dengan mengadakan penelitian di

[31] Moleong .Lexy ,J,*Metodology Penelitian Kualitatif ,Bandung* :Remaja Rosdakarya,1998.

Kabupaten Sampang secara langsung , diharapkan peneliti dapat secara leluasa untuk menelisik dan mengeksplorasi data – data langsung dari sumbernya, serta merasakan langsung suasana kinerja Kader Perempuan Partai Hanura di tempatnya .